

MENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL (Pergeseran Paradigma Humanis Menjadi Bisnis)

Adri Efferi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

Email: adri.efferi@gmail.com

ABSTRACT

Globalization is like a two-sided coin that each piece has its own role, meaning that globalization has led to remarkable progress in human civilization, but at the same time is also not a few negative effects caused by the advent of globalization. We take the example that occurred in education today. Globalization that is characterized by ease of access to information, has caused a tremendous leap. Important discoveries were created in education such as teaching methods, curricula, media and others, so easily dispersed in a short time even within minutes and even seconds. But on the other hand, globalization also brings negative effect nor simple, for example in the management of educational institutions, there has been a paradigm shifting which originally humanist (humanity), into the calculations of profit and loss (business)

ABSTRAK

Globalisasi ibaratkan dua sisi keping mata uang yang satu bagian dengan bagian yang lain saling berperan, artinya globalisasi telah menyebabkan kemajuan yang luar biasa pada peradaban manusia, namun pada saat yang bersamaan juga tidak sedikit efek negatif yang ditimbulkan dengan datangnya globalisasi itu. Kita ambil contoh yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini. Adanya globalisasi yang ditandai dengan kemudahan dalam mengakses informasi, telah menyebabkan lompatan yang sangat luar biasa. Penemuan-penemuan penting yang tercipta dalam dunia pendidikan seperti metode pengajaran, kurikulum, media dan lain-lain, demikian mudahnya tersebar dalam waktu yang tidak lama bahkan hanya dalam hitungan menit bahkan detik saja. Namun di sisi lain, globalisasi juga mendatangkan efektif negatif yang juga tidak sederhana, sebagai contoh dalam pengelolaan lembaga pendidikan, telah terjadi pergeseran paradigma yang semula humanis (kemanusiaan), menjadi hitung-hitungan untung rugi (bisnis).

Kata-kata kunci: Globalisasi, Komersialisasi Pendidikan.

Pendahuluan

Era global yang melanda segenap penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia telah berlangsung dengan sangat cepatnya. Tidak bisa dipungkiri globalisasi yang sedemikian kuat juga menimbulkan efek yang bersifat global pula. Kondisi ini tentunya menuntut kemampuan unggul yang mampu mensiasati dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang sedang dan akan terjadi.

Globalisasi semakin membuka pintu-pintu interaksi antar bangsa di dunia, konsekuensinya batas-batas politik, ekonomi, sosial budaya menjadi semakin kabur, bahkan tensi persaingan antar bangsa-bangsa tersebut akan semakin ketat dan tak dapat dihindari, terutama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya negara yang memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tersebut, yang akan dapat mengambil manfaat atau keuntungan yang banyak dari adanya globalisasi itu.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, penguasaan teknologi informasi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh individu atau masyarakat, yang mampu memenangkan persaingan di kompetisi global, kalau tidak mau hanya jadi penonton semata. Sudah barang pasti kondisi tersebut menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki jati diri. Salah satu wahana yang sangat strategis dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, dengan profil seperti yang disebutkan di atas adalah melalui pendidikan.

Pendidikan yang dimaksud tentunya adalah model pendidikan yang menyesuaikan atau bisa memenuhi tuntutan dari era global itu. Sudah bukan zamannya lagi dipertahankan atau tetap dilaksanakan pendidikan yang cenderung bersifat indokrinatif atau dogmatis, bahkan terlalu didikte oleh birokrasi yang terkadang sangat kaku dan bertele-tele. Karena sejarah telah membuktikan, hasil dari pendidikan yang konservatif itu telah mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan dari lembaga pendidikan kita sangat rendah kualitasnya, dan tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, bahkan lebih ironis lagi dari negara-negara

tetangga seperti Malaysia, Singapura, Philipina dan lain-lain yang notabene menghirup udara kemerdekaan jauh di belakang kita.

Menghadapi situasi yang memprihatinkan ini, tentunya kita tidak boleh hanya pasrah dan berpangku tangan saja, dibutuhkan upaya-upaya yang kreatif dan inovatif agar kualitas pendidikan kita di masa-masa yang akan datang bisa berdampingan bahkan sejajar dengan negara-negara yang ada di dunia ini, sekurang-kurangnya dalam waktu yang tidak begitu lama bila dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi tetangga kita.

Akan tetapi perlu menjadi catatan, barometer dari kemajuan atau kualitas pendidikan tersebut jangan sekali-kali menggunakan sudut pandang (perspektif) ekonomi semata. Karena bila sudut pandang ini yang dipakai, maka orientasinya sudah pasti ekonomi (untung-rugi) juga, lalu pertanyaannya mau dibawa kemana dunia pendidikan kita ke depannya, dan apa masih bisa pendidikan disebut sebagai aktifitas kemanusiaan yang selama ini bersifat non profit.

Berangkat dari beberapa statemen-statemen dan fenomena yang menggelisahkan di atas, tulisan ini akan mencoba mengurai dampak negatif yang ditimbulkan oleh arus global bagi dunia pendidikan, khususnya terkait dengan aspek pengelolaannya.

Arti Penting Globalisasi

Menghindari pemahaman yang keliru tentang globalisasi, tentunya di awal pembahasan ini perlu dikemukakan atau dibuat kesepahaman bersama tentang makna kosa kata ini. Menurut Nurani Soyomukti (2010) kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal yang ruang lingkungannya meliputi seluruh dunia. Globalisasi sebagai proses juga mempunyai keterkaitan dengan *globalution* yaitu padanan kata dari *globalization* dan *evolution*.

Albrow (1990) mengatakan bahwa "*Globalization refers to all those processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society, global society*". (Globalisasi merupakan keseluruhan proses dimana orang-orang di dunia tergabung menjadi masyarakat dunia yang satu atau masyarakat global).

Senada dengan pendapat di atas Edison A. Jamli (2005)

menyatakan bahwa globalisasi sebagai suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia tidaklah mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Globalisasi menurut pendapat Sztompka (2004), dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Artinya, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung pada semua aspek kehidupan, baik secara budaya, ekonomi, maupun politik, sehingga cakupan saling ketergantungan benar-benar mengglobal. Misalnya, dalam bidang politik, globalisasi ditandai dengan adanya kesatuan supranasional dengan berbagai cakupan blok politik dan militer dalam NATO (*North Atlantic Organization*), koalisi kekuasaan dominan, dan organisasi berskala Internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

Dari beberapa definisi tentang globalisasi di atas, dapat dirumuskan pengertian globalisasi sebagai sebuah proses mengglobal atau menyatu atau menjadi satu yang tidak ada batasnya, sehingga ketika kata globalisasi digunakan dalam konteks dunia, maka maknanya menjadi menyatunya negara-negara di dunia ini seakan-akan antara satu negara dengan negara lain tidak ada lagi batasnya. Sebagai contoh, apapun peristiwa yang terjadi pada satu negara, maka akan mudah diketahui oleh orang lain di wilayah negara yang berbeda pada hari, jam, menit bahkan detik yang sama pula.

Mengutip pendapat J. A. Scholte (2002) selanjutnya dapat diakses pada skripsi Dwi Hartini (2011) melalui digilib.uns.ac.id yang menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima kategori pengertian tentang globalisasi secara umum. Kelima kategori definisi tersebut berkaitan satu sama lain dan masing-masing mengandung unsur yang khas. Berikut kelima kategori pengertian globalisasi secara umum:

1. Globalisasi Sebagai Internasionalisasi

Globalisasi dalam konsep ini dipandang sebagai kata sifat (*adjective*) untuk menggambarkan hubungan antar batas dari berbagai negara. Globalisasi menggambarkan pertumbuhan

dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antar negara semakin terintegrasi menuju ekonomi global.

2. Globalisasi Sebagai Liberalisasi

Dalam pengertian ini, globalisasi merupakan sebuah proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa-batas. Sehingga jika setuju dengan pendapat pentingnya menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan kontrol modal biasanya berlandung di balik globalisasi.

3. Globalisasi Sebagai Universalisasi

Dalam pemahaman ini, kata *global* digunakan sebagai proses mendunia dan globalisasi merupakan proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Contoh klasik dari konsep ini adalah penyebaran teknologi komputer, televisi maupun internet.

4. Globalisasi Sebagai *Westernisasi* atau Modernisasi

Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, adanya struktur-struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme bahkan birokratisme) disebarkan ke seluruh penjuru dunia yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mendarahdaging serta merampas hak *self determination* rakyat setempat.

5. Globalisasi Sebagai Penghapusan Batas-Batas Teritorial (Sebagai Persebaran Supra-Teritorialitas)

Globalisasi dalam kategori ini dipahami sebagai sebuah proses yang melahirkan sebuah transformasi dalam spatial organisasi dari hubungan sosial dan transaksi ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya yang memutar mobilitas antarbenua atau antar regional serta jaringan aktivitas.

Dari kelima kategori pengertian globalisasi di atas maka adanya globalisasi dapat dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial dan kultural yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal

yang berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi serta transportasi.

Dampak Globalisasi Pada Pengelolaan Pendidikan

Globalisasi ibaratkan dua sisi keping mata uang yang satu bagian dengan bagian yang lain saling berperan, artinya globalisasi telah menyebabkan kemajuan yang luar biasa pada peradaban manusia, namun pada saat yang bersamaan juga tidak sedikit efek negatif yang ditimbulkan dengan datangnya globalisasi itu.

Kita ambil contoh yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini. Adanya globalisasi yang ditandai dengan kemudahan dalam mengakses informasi, telah menyebabkan lompatan yang sangat luar biasa. Penemuan-penemuan penting yang tercipta dalam dunia pendidikan seperti metode pengajaran, kurikulum, media dan lain-lain, demikian mudahnya tersebar dalam waktu yang tidak lama bahkan hanya dalam hitungan menit bahkan detik saja.

Adapun sisi negatifnya, mengutip dari Andrias Harefa (2005) dikatakan bahwa pendidikan di era globalisasi saat ini telah terjebak dalam arus kapitalisasi yang dalam istilah lain bernama komersialisasi pendidikan. Adanya biaya pendidikan yang tidak murah berakibat pada banyaknya anak yang berasal dari kelas ekonomi bawah sulit mendapatkan akses pendidikan yang lebih bermutu. Sekolah kemudian menerapkan aturan seperti pasar yang berimplikasi pada visiologi pendidikan yang salah. Keberhasilan pendidikan hanya didasari pada besarnya jumlah lulusan sekolah yang dapat diserap oleh sektor industri. Pendidikan semacam ini tidak untuk menjadikan manusia-manusia melek sosial, padahal sebetulnya tujuan pendidikan untuk mengembangkan intelektual yang ada pada siswa.

Kondisi di atas semakin diperparah dengan mudahnya perizinan untuk pendirian lembaga pendidikan baru. Hal ini telah menjadikan para pemilik modal besar (kelas kakap) berlomba dalam sektor ini, karena secara hitung-hitungan bisnis pendidikan merupakan salah satu sektor publik yang cukup menguntungkan pada saat ini. Mengapa demikian, karena pendidikan merupakan kategori kebutuhan dasar bagi setiap orang. Selama masih ada kelahiran di muka bumi

ini, maka selama itu pula lembaga-lembaga pendidikan tidak akan pernah tutup, atau kehilangan peminatnya. Disamping itu, bagi para pengelola lembaga pendidikan tidak banyak dipusingkan dengan situasi politik maupun ekonomi, sekalipun ada pengaruhnya tidak sehebat bila terjadi pada dunia industri atau bidang-bidang bisnis lainnya.

Bermunculannya lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh perorangan maupun kelompok, pada satu sisi kondisi ini sangat menggembirakan namun di sisi lain membuat persaingan semakin tidak sehat. Alasannya adalah persaingan hanya milik pemodal kuat dengan berbagai strategi intervensinya. Sebagai contoh mari kita sama-sama cermati dan perhatikan dengan seksama, fenomena yang terjadi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Betapa perkembangan lembaga PAUD di tingkat RT/RW bahkan dusun di beberapa tempat mengalami kondisi mati suri. Mereka mengalami stagnasi organisasi dan tidak inovatif sehingga kalah bersaing dengan lembaga sejenis yang memiliki konsep terarah, inovatif dan memiliki nama atau bonafid. Akibat selanjutnya adalah lembaga tersebut akan semakin tertinggal bahkan kehilangan calon anak didik.

Masyarakat lebih percaya pada lembaga yang merupakan cabang dari Jakarta bahkan luar negeri, dan anehnya orang tua menutup mata terhadap biaya pendidikan berapapun yang harus dibayar dengan tendensi kualitas dan inovasi. Dampak selanjutnya lembaga lokal yang berbasis sumber daya terbatas semakin tersisih karena mereka kehilangan masyarakat yang mampu membayar, bahkan pada beberapa kasus terdapat banyak lembaga yang kesulitan memenuhi target anak didik dan target pemasukan keuangan karena masyarakat sarasannya memiliki kemampuan finansial yang terbatas pula.

Pada tahapan selanjutnya, karena sedemikian eratnya pengelolaan lembaga pendidikan dengan praktek-praktek yang biasa berlaku dalam dunia bisnis, muncullah pengkomersilan atau dengan istilah populernya komersialisasi pendidikan. Keadaan menjadi semakin runyam setelah adanya komersialisasi pendidikan, banyak lembaga pendidikan yang kemudian menganut paradigma pendidikan yang bersifat ekonomis. Ironisnya, lembaga pendidikan pada akhirnya gagal mengimplikasikan bahwa proses pembelajaran menjadi salah

satu pilar utama dalam humanisasi hidup manusia.

Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga telah menciptakan jurang pemisah, antara pihak yang mempunyai modal dan pihak yang mempunyai sedikit modal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ivan Illich dkk., (2001), komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern mengabdikan kepada kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas.

Akibatnya pendidikan yang humanisasi tidak tercapai dalam proses pendidikan, karena adanya komersialisasi pendidikan. Menurut Satriyo Brojonegoro sebagaimana dikutip oleh Darmaningtyas, (2005) pendidikan hanya mampu dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, yang memiliki modal untuk mengakses pendidikan.

Menurut Marx sebagaimana dikutip oleh Nurani Soyomukti (2010), pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai kecakapan hidup serta media sosialisasi dalam masyarakat. Namun, peran pendidikan juga mempunyai keterkaitan dengan masalah ekonomi bahkan menjadi faktor yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses tercapainya pendidikan yang berkualitas. Sehingga maraknya komersialisasi pendidikan di era globalisasi saat ini juga menimbulkan berbagai opini pro dan kontra yang dilontarkan oleh masyarakat melalui tulisan-tulisan di media massa yang merupakan suatu fenomena yang begitu memprihatinkan pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan nasional dalam praktiknya masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan kecenderungan dunia pendidikan saat ini yang banyak terjebak ke arah komersialisasi bahwa pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi maupun sekolah dengan status yang kurang jelas tumbuh subur terutama di kota besar bahkan merambah ke kota kecil. Dengan berbagai cara, lembaga pendidikan tersebut mengiklankan dan menawarkan program pendidikan untuk mendapatkan gelar seperti MBA (*Magister Bisnis Administration*) maupun MM (*Magister Management*) tanpa

melalui proses pembelajaran. Lembaga lembaga tersebut lebih mementingkan keuntungan daripada mutu sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan Indonesia. Selain itu, muncul juga sekolah-sekolah dengan program dan perlengkapan yang serba mahal mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pada tingkat perguruan tinggi yang hanya dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan.

Globalisasi dan Bisnis Pendidikan

Menurut hemat penulis ada dua pemahaman yang perlu dibedakan, ketika membahas sub bagian ini, *pertama* bisnis pendidikan dengan makna para pelaku pendidikan mengadopsi nilai-nilai atau filosofi serta teori-teori yang berlaku dalam dunia bisnis, kemudian diterapkan dalam konteks pendidikan. *Kedua*, bisnis pendidikan dengan arti bahwa pendidikan sebagai objek bagi para pelaku bisnis, dengan kata lain pendidikan betul-betul menjadi komoditas yang diperjualbelikan, layaknya objek atau materi lain.

Pada pemahaman yang pertama sesungguhnya nilai-nilai yang akan diperoleh sangat positif sekali. Mengapa demikian, karena sesungguhnya kendala-kendala yang dihadapi dunia pendidikan kita, salah satu diantaranya adalah aspek pengelolannya yang masih sangat lemah sekali, disamping tentunya kendala-kendala klasik seperti kurikulum yang senantiasa bergonta-ganti sesuai dengan keinginan segelintir orang, SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang masih jauh dari harapan, sarana prasarana yang masih sangat minim dan lain-lain sebagainya.

Aspek pengelolaan yang masih lemah, apabila kita tinjau dari sudut pandang bisnis misalnya pada bagian promosi atau pemasaran sebuah lembaga pendidikan. Jamak kita jumpai khususnya pada saat-saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Rata-rata strategi promosi yang digunakan oleh sebuah lembaga pendidikan adalah dengan cara-cara yang monoton dan cenderung sudah sangat ketinggalan zaman, seperti pemasangan spanduk/banner di tempat-tempat yang diasumsikan banyak dilihat atau dilewati orang, bahkan lebih tragis lagi pohon-pohon di pinggir jalan telah berubah fungsi, bukan lagi sebagai pelindung dari panas matahari atau tempat berteduh ketika

hujan turun, tapi sudah menjadi media pemasangan spanduk. Belum lagi penyebaran leaflet atau brosur yang ujung-ujungnya hanya menambah tumpukan sampah, karena tampilannya yang tidak menarik sehingga membuat orang malas untuk membaca lalu dibuang begitu saja, dan lain-lain sebagainya.

Kalau memang para pengelola sebuah lembaga pendidikan serius untuk memasarkan lembaga pendidikannya, mengapa tidak mencontoh trik-trik pemasaran yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau penghasil produk tertentu, yang begitu kreatif dan inovatif. Mari kita perhatikan model-model iklan yang banyak ditayangkan di berbagai media massa saat ini. Dulu antara satu produk dengan produk yang lain, iklannya saling serang bahkan menjelek-jelekkan, tapi saat ini model iklan seperti itu sudah sangat jarang dan mulai ditinggalkan. Sisi-sisi yang ditonjolkan adalah keunggulan dari setiap produk yang diiklankan itu. Mengapa demikian, karena target yang dituju adalah membuka wawasan atau mencerdaskan konsumen dalam memilih satu produk, dan biasanya konsumen-konsumen yang seperti ini akan menjadi fanatik dan sulit untuk berpaling pada produk lain.

Hal seperti inilah seharusnya yang dilakukan oleh para pengelola lembaga pendidikan. Bentuk promosi mereka adalah dengan menonjolkan atau menunjukkan prestasi lebih yang dimiliki dibanding lembaga pendidikan sejenis. Kalau hanya iming-iming fasilitas gratis (seragam, alat-alat tulis dan semisalnya), ini hanya bersifat sementara kalau ada yang menawarkan lebih maka para orang tua atau calon peserta didik akan berpaling. Tapi kalau yang dilihatkan adalah keunggulannya, hasilnya bisa dibuktikan sendiri.

Konsep bisnis yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan tentunya tidak terbatas pada aspek pemasaran atau promosi saja, pada sisi pengelolaan keuangannya, rekrutmen dan pengembangan SDM juga bisa dicontoh, dan pada aspek atau sisi-sisi yang lain. Intinya, marilah kita kelola lembaga pendidikan itu dengan sangat serius layaknya sebuah lembaga bisnis, bukan hanya dengan prinsip yang penting jalan atau hanya sebatas aktifitas rutin.

Pembahasan dengan pemahaman bisnis pendidikan seperti di atas, menurut penulis para pembaca juga akan

sepakat. Tetapi tentunya bukan demikian apabila kemudian kita bahas pemahaman yang selanjutnya, dimana bisnis pendidikan itu dipahami bahwa pendidikan sebagai komoditas bagi dunia bisnis, yang disadari atau tidak mulai marak beberapa dekade belakangan ini.

Bisnis pendidikan menjadi lahan bisnis yang menggiurkan, karena memiliki pangsa pasar yang jelas sehingga akan dengan mudah meraup keuntungan. Kecermatan dalam membidik peluang usaha pendidikan dapat terlihat dari berlomba-lombanya orang (terutama yang memiliki modal) untuk membangun gedung sekolah. Tujuannya bukan untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi meraup keuntungan dari bisnis yang menjanjikan ini.

Apabila kita menelusuri kapan terjerumusny dunia pendidikan pada praktek-praktek yang bernuansa bisnis, sejatinya dimulai ketika menguatnya liberalisasi ekonomi dan krisis multidimensi di Indonesia. Dua kondisi ini kemudian memberi legitimasi pada pemerintah untuk melakukan privatisasi pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk melakukan privatisasi di bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang pada mulanya merupakan tanggung jawab utama pemerintah diserahkan kepada pihak swasta. Karena motif utama pihak swasta adalah mencari keuntungan, tidaklah mengherankan jika privatisasi kemudian merosot menjadi komersialisasi pendidikan. Dunia pendidikan ditransformasikan menjadi lahan bisnis dan investasi ekonomi semata. Akibatnya, pendidikan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau masyarakat bawah. Biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi (PT) semakin mahal dan cenderung tidak terkendali.

Dalam pandangan pendidikan sebagai komoditas, akan menimbulkan pergeseran yang menjadikan pendidikan bersifat elitis. Artinya, hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu saja yaitu yang mampu membayar. Padahal seharusnya pendidikan itu bersifat populis yaitu harus dinikmati oleh semua orang sesuai dengan haknya masing-masing.

Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal, sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta persiapan dana pendidikan sejak dini. Akibatnya tanggung

jawab orang tua sangat berat terhadap pendidikan untuk membiayai anak sejak lahir sampai menginjak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan dan mengikuti pendidikan dasar, maka pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional atau biasa disebut dengan Sisdiknas yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”. Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan bantuan pembiayaan, layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Disamping alasan-alasan di atas, munculnya perilaku membisniskan pendidikan menurut pendapat penulis karena adanya asumsi yang keliru terkait dengan mutu pendidikan. Terlanjur menjadi pandangan umum (*common sense*) di kalangan masyarakat bahwa mutu pendidikan memerlukan biaya pendidikan yang memadai. Sehingga sekolah yang bermutu dianggap sebagai sekolah yang mahal dan hanya dapat dinikmati oleh golongan orang mampu (*the have*) atau golongan orang-orang berada.

Oleh karena itu, pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya, harus berpikir secara serius sehingga mampu melahirkan kebijakan-kebijakan, sehingga mampu memutus rantai praktek-praktek yang menjadikan pendidikan ini sebagai lahan bisnis. Apabila hal ini tidak segera diatasi, penulis dan juga pembaca yang peduli terhadap dunia pendidikan, tidak lagi was-was akan kemerosotan dunia pendidikan kita yang cenderung berlangsung secara perlahan-lahan ini.

Menyikapi Globalisasi Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan

Tidak bisa dipungkiri bahwa era globalisasi saat ini, telah mengancam kemurnian dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai contoh, banyaknya sekolah yang didirikan dengan tujuan untuk media bisnis. Selain itu, munculnya sekolah-sekolah

swasta elit yang bersaing menawarkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan, juga tidak jauh berbeda dalam memungut biaya pendidikan yang tinggi. Sehingga banyak yang menawarkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan dengan imbalan uang yang tidak sedikit jumlahnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat menuntut hadirnya perubahan paradigma pendidikan yang berorientasi pada pasar dan kebutuhan hidup masyarakat. Sayling Wen dalam bukunya "*future of education*" yang dikutip oleh Sujarwo (2006) menyebutkan beberapa pergeseran paradigma pendidikan, antara lain:

1. Pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan bergeser menjadi pengembangan ke segala potensi yang seimbang. Pada pendidikan orientasi pendidikan lebih menekankan pada pemindahan informasi yang dimiliki kepada peserta didik (bersifat kognitif). Proses pembelajaran yang berkembang di negara kita, dapat dideskripsikan sebagai berikut: peran guru sangat dominan dalam proses pembelajaran, kesan yang muncul adalah guru mengajar peserta didik diajar, guru aktif peserta didik pasif, guru pintar peserta didik minder, guru berkuasa, peserta didik dikuasai. Dalam kegiatannya pendidik berusaha mempola anak didik sesuai dengan kehendaknya. Program pembelajaran, materi, media, metode dan evaluasi yang diterapkan sepenuhnya disiapkan oleh pendidik.
2. Dari keseragaman pembelajaran bersama yang sentralistik menjadi keberagaman yang terdesentralisasi dan terindividu-lisasikan. Hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dimana informasi dapat diakses secara mudah melalui berbagai macam media pembelajaran secara mandiri, misalnya: internet, multimedia pembelajaran, dan sebagainya.
3. Pembelajaran dengan model penjenjangan yang terbatas menjadi pembelajaran seumur hidup. Belajar tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, namun belajar dapat dilakukan sepanjang hayat, yang tidak terbatas pada tempat, usia, waktu, dan fasilitas.
4. Dari pengakuan gelar ke arah pengakuan kekuatan-kekuatan nyata (profesionalisme).

Dilihat dari kualitas pendidik, secara kuantitatif jenjang

pendidikan yang dimiliki guru-guru SD, SLTP, SMU/SMK cukup menjanjikan, Sebagian besar sarjana atau D2. Hal ini ditunjukkan dengan gelar yang dimiliki pada pendidik, namun secara kualitas, sungguh memprihatinkan. Secara kualitatif bisa dilihat, motivasi belajar dan motivasi berprestasi dalam meningkatkan profesionalisme di kalangan pendidik sangat rendah. Sebagian besar guru malas belajar, malas mencari pengetahuan baru, dan berkarya (baca: tekun membaca, mengikuti pelatihan, menulis karya ilmiah). Pola pikir yang berkembang pada pendidik saat ini lebih loyal pada integrasi gaji daripada loyalitas profesional, dengan nafsu mengejar pangkat, golongan, posisi dan tunjangan. Di antara pendidik ada yang melanjutkan kuliahnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S1, S2 dan S3), bukan untuk meningkatkan kualitas diri dan profesi, namun demi "gengsi, posisi dan gaji", kesempatan kuliah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas diri dan profesi secara mandiri mulai menghilang. Kondisi demikian sungguh memprihatinkan. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan persaingan global, kompetensi dan profesionalisme akan menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang dalam memenangkan persaingan hidup. Prestasi kerja menempatkan seseorang pada posisi kerja yang sesungguhnya ("saat ini muncul *image* posisi kerja adalah uang")

5. Pembelajaran yang berbasis pada pencapaian target kurikulum bergeser menjadi pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dan produksi. Pencapaian target kurikulum bukan satu-satunya indikator keberhasilan proses pendidikan, keberhasilan pendidikan hendaknya di lihat dari konteks, input, proses, *output* dan *outcomes*, sehingga keberhasilan pendidikan dapat dimaknai secara komprehensif. Masih banyak lembaga pendidikan kita yang masih menekankan pada pencapaian target kurikulum, contoh dilapangan: kita lihat kurikulum pendidikan dasar, pada jenjang pendidikan dasar (masa kanak-kanak dan SD) merupakan jenjang pendidikan yang menyenangkan (masa bermain), coba kita lihat setelah anak mulai masuk di TK atau di SD kesempatan bermain bagi anak sangat dibatasi. Sistem pembelajaran yang diterapkan membatasi gerak anak dengan dinding

dan keangkuhan guru yang sangat kokoh di depan kelas. Anak-anak mulai dipola sekehendak gurunya yang dengan dalih agar sesuai dengan kurikulum yang telah dirumuskan oleh pejabat pendidikan, meskipun dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Peserta didik SD yang seharusnya masih menggunakan konsep pendidikan bermain sambil belajar, namun mulai menghilang, yang muncul belajar sambil bermain. Sehingga anak-anak SD kurang mengenal nama-nama benda, tumbuhan, binatang yang ada disekitarnya. Kondisi ini wajar, karena beban pelajaran yang dipersyaratkan dalam kurikulum yang harus ditanggung peserta didik di SD begitu berat (9 mata pelajaran), belum lagi masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang sebagian besar bersifat menghafal (*mengkhayal*) hal-hal yang terpisah dari kemampuan dan tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejak masa kanak-kanak para peserta didik telah dikondisikan dengan pencapaian target kuantitatif yang sangat berat. Untuk mengurangi jumlah pengkhayal dalam pendidikan, sebaiknya pada jenjang pendidikan dasar mulai dipikirkan menerapkan kurikulum dasar yang berbasis pada mata pelajaran Matematika, bahasa, sains, jasmani dengan memperhatikan pemberdayaan sistem nilai yang berkembang di daerahnya. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan kontekstual.

6. Pendidikan sebagai investasi manusia dengan *high cost*, yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, khususnya pendidikan tinggi.

Persaingan antar lembaga pendidikan merupakan sebuah proses evolusi. Maksud evolusi adalah makna persaingan antar lembaga pendidikan yang telah bergeser dari konteks, substansi, strategi, dan polanya sehingga terdapat konsekuensi terhadap kecenderungan kompetisi dalam bisnis pendidikan. Persaingan tidak lagi menyangkut efisiensi penyelenggaraan pendidikan, namun secara terstruktur telah menjadi pandangan umum (*common sense*) jika lembaga pendidikan yang dipilih adalah yang memiliki keunggulan pada hampir semua aspek (input, proses, dan output).

Ismara (2005) menyatakan bahwa manajemen pelayanan publik mulai ditinggalkan menjadi manajemen bisnis yang

mau tidak mau harus mengutamakan *price, prospect, product, profit, priority, place, people, profile, and promotion*. Akibatnya, juga perlu mempertimbangkan *competitor, competitive advantages, added value, dan diversity*, untuk dapat membuat puas pelanggan (*impressive experienced and satisfied services*), sehingga pangsa pasar bisnis pendidikan dicermati dengan sangat teliti. Spesifikasi permintaan pelanggan dijabarkan dengan rinci dan diberi atribut kompetensi, yang kelak diharapkan dapat menciptakan performansi kerja luaran (baik *output, outcome, maupun impact*) yang sempurna.

Persaingan antar lembaga pendidikan merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dan berlangsung semakin ketat. Kondisi demikian semestinya disikapi lembaga pendidikan dengan berbagai langkah antisipatif jika mereka menginginkan eksistensi dan pengembangan secara berkelanjutan. Beberapa strategi sebenarnya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan jika ingin memenangkan persaingan antar lembaga.

Lebih lanjut menurut Ismara (2005) ada beberapa faktor secara dominan mempengaruhi daya saing sebuah lembaga pendidikan antara lain:

1. Lokasi, secara umum lembaga pendidikan akan berupaya mencari lokasi yang mudah dijangkau, dan memiliki akses terhadap sektor lainnya sehingga faktor ini merupakan salah satu keunggulan komparatif, untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.
2. Keunggulan nilai, misalnya kelebihan kurikulum yang diterapkan, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga keunggulan kerjasama.
3. Kebutuhan masyarakat, pada beberapa kasus umum terdapat beragam alasan orang tua menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan tertentu, salah satu alasan yang paling mengemuka adalah faktor kualitas menyangkut proses pembelajaran dan hasilnya, termasuk kepastian setelah anak mereka menamatkan pendidikan dari sebuah lembaga pendidikan. Masyarakat menilai keterserapan mereka di sekolah berkualitas pada tingkat di atasnya, merupakan salah satu alasan mereka rela menyekolahkan anaknya berbondong-bondong ke kota.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Sujarwo (2006)

untuk membekali terjadinya pergeseran orientasi pendidikan di era global dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, diperlukan strategi pengembangan pendidikan, antara lain:

1. Mengedepankan model perencanaan pendidikan (partisipatif) yang berdasarkan pada *need assessment* dan karakteristik masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi.
2. Peran pemerintah bukan sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator dan pemberdaya masyarakat.
3. Penguatan fokus pendidikan, yaitu fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan *stakeholders*, kebutuhan pasar dan tuntutan teman saing.
4. Pemanfaatan sumber luar (*out sourcing*), memanfaatkan berbagai potensi sumber daya (belajar) yang ada, lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pranata-pranata kemasyarakatan, perusahaan/industri, dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan.
5. Memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah, bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri.
6. Menciptakan *soft image* pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar, sebagai masyarakat belajar seumur hidup.
7. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu: lembaga-lembaga pendidikan baik jalur pendidikan formal, informal maupun jalur non formal dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya (misal; penggunaan internet, multi media pembelajaran, sistem informasi terpadu, dan sebagainya)

Kesimpulan

Daya pengaruh globalisasi mampu menembus hampir semua segi kehidupan manusia baik individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pada era globalisasi adalah

suatu pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi era globalisasi. Pendidikan ini harus dapat membentuk sumber daya manusia yang siap bersaing secara sempurna pada era yang sangat terbuka ini bagi siapa saja untuk turut bersaing dari setiap negara peserta.

Persaingan bebas ini menuntut kesiapan setiap negara secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta, kalau tidak negara tersebut harus bersiap-siap untuk bangkrut dan keluar dari arena persaingan. Artinya suatu negara harus melaksanakan atauformasi sistem perekonomian, sistem perdagangan, sistem produksi, dan yang terpenting sistem pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan. Jika negara tersebut tidak mengindahkannya maka akan menjadi penonton di negara sendiri atau menjadi pemakai (penikmat) keberhasilan negara lain.

Munculnya globalisasi telah mendatangkan perubahan yang sangat dahsyat bagi peradaban dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Namun pada saat yang bersamaan globalisasi juga membawa efek negatifnya. Salah satunya adalah yang terjadi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Berawal dari globalisasi dalam ekonomi, pendidikan tidak kuasa menolak campur tangan dari para pemilik modal besar untuk masuk dan ikut berkecimpung di dalamnya. Maka kemudian jadilah pendidikan sebagai bagian dari komoditas, yang dikelola sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang berlaku. Kondisi ini selanjutnya membentuk pendidikan sebagai salah satu lahan bisnis yang menggiurkan, adapun ujung akhirnya praktek komersialisasi dunia pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan usaha-usaha yang serius dan kebijakan-kebijakan yang strategis, untuk mengangkat pendidikan itu dari jurang kegelapannya, agar tidak terperosok semakin dalam bahkan dalam bahasa yang lebih provokatif menyelamatkan dunia pendidikan kita dari mendekati kiamatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, *Globalization, Knowledge and Society*, Sage, London, 1990.
- Darmaningtyas, *Ilusi tentang Guru dan Profesionalisme*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005.
- Harefa, Andrias, *Menjadi Manusia Pembelajar*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005.
- Hartini, Dwi, *Komersialisasi Pendidikan di Era Globalisasi; Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011*, digilib.uns.ac.id, di akses tanggal 15 Oktober 2015.
- Illich, Ivan dkk, *Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*, terj. Alois Nugroho, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Ismara, K. Ima, *Merobah Tantangan menjadi Peluang dalam Bisnis dan Idealisme Pendidikan*, FT-UNY, Yogyakarta, 2005.
- Jamli, Edison A., *Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2010.
- Sujarwo, "Reorientasi Pengembangan Pendidikan di Era Global", *Dinamika Pendidikan*; Majalah Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, No. 2 tahun XIII September 2006.
- Sztompka, Piötr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan dari "The Sociology of Social Change", Prenada, Jakarta, 2004.